

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penyusunan rencana alokasi lahan permukiman sebagai dampak pengembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang tahun 2045 dilakukan melalui serangkaian analisis yang meliputi proyeksi penduduk, proyeksi kebutuhan tenaga kerja pendatang, kebutuhan hunian, fungsi kawasan, kesesuaian lahan, hingga penentuan prioritas pengembangan permukiman. Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan kawasan industri akan mendorong peningkatan jumlah penduduk secara signifikan, baik dari penduduk lokal maupun tenaga kerja pendatang. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan hunian dan kebutuhan lahan permukiman di Kabupaten Karawang.

- Berdasarkan hasil analisis kebutuhan lahan, pada tahun 2045 kebutuhan lahan hunian baru diperkirakan mencapai 12.549,75 ha, yang terdiri dari 12.404,44 ha untuk penduduk lokal dan 145,31 ha untuk tenaga kerja pendatang.
- Hasil analisis kesesuaian lahan menunjukkan terdapat 34.111,07 ha lahan yang sesuai untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman.
- Perbandingan antara kesesuaian lahan dan pola ruang permukiman menunjukkan bahwa tidak seluruh lahan yang direncanakan sebagai kawasan permukiman memiliki kondisi fisik yang sesuai. Beberapa wilayah memiliki keterbatasan, seperti kemiringan lereng yang tinggi dan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
- Secara keseluruhan, ketersediaan lahan yang sesuai di Kabupaten Karawang masih mampu memenuhi kebutuhan lahan permukiman hingga tahun 2045 karena berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa terdapat 27.433,46 ha lahan yang direncanakan sebagai alokasi lahan permukiman.
- Penentuan prioritas pengembangan permukiman dilakukan berdasarkan tingkat kesesuaian lahan, aksesibilitas, dan harga lahan, yang kemudian dibagi menjadi lima kategori prioritas pengembangan.
- Kawasan pengembangan permukiman prioritas 1 diarahkan sebagai lokasi utama pengembangan permukiman dan sebagian besar berada di Kecamatan Ciampel, Klari, Telukjambe Barat, Purwasari, dan Kotabaru.
- Kecamatan-kecamatan tersebut termasuk dalam kategori Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Karawang, memiliki aksesibilitas yang

baik, serta harga lahan yang relatif terjangkau sehingga dinilai strategis untuk pengembangan kawasan permukiman.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penyusunan rencana alokasi lahan permukiman sebagai dampak pengembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

A. Pemerintah Kabupaten Karawang

1. Pemerintah daerah perlu memperhatikan alokasi lahan pengembangan permukiman dengan menggunakan analisis kesesuaian lahan dalam mengarahkan lokasi pengembangan sehingga lokasi permukiman berada pada kawasan yang memiliki kondisi fisik dan lingkungan yang mendukung, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif, aman, serta meminimalkan potensi konflik pemanfaatan ruang.
2. Pemerintah daerah perlu melakukan sinkronisasi antara hasil analisis kesesuaian lahan dengan rencana pola ruang sehingga kebijakan pemanfaatan ruang dapat lebih selaras dengan kondisi aktual di Kabupaten Karawang, sekaligus mengurangi ketidaksesuaian antara rencana dan implementasi di lapangan.
3. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan aspek aksesibilitas serta nilai lahan dalam menentukan lokasi pengembangan permukiman baru. Kawasan dengan akses yang baik terhadap jaringan jalan, pusat kegiatan, fasilitas umum, dan layanan dasar akan lebih mendukung kenyamanan masyarakat. Selain itu, pertimbangan nilai lahan juga diperlukan agar pembangunan permukiman dapat dilaksanakan secara ekonomis, terjangkau, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
4. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pembangunan permukiman vertikal sebagai salah satu solusi strategis dalam menghadapi keterbatasan lahan. Optimalisasi penggunaan ruang melalui hunian bertingkat memberikan sisa lahan yang tersedia untuk dapat dimanfaatkan secara efisien dan berkelanjutan. Hal tersebut mampu menjadi upaya antisipatif untuk memastikan ketersediaan ruang yang memadai seiring dengan pertumbuhan penduduk di masa mendatang. Pengembangan permukiman secara vertikal juga mendukung penataan kota yang lebih tertib, mengurangi perluasan wilayah secara horizontal, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

B. Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data status kepemilikan tanah karena data tersebut memiliki pengaruh penting dalam menentukan arah serta kemudahan pengembangan permukiman.
2. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan validasi lapangan dengan *margin of error* yang lebih kecil sehingga tingkat ketelitian dan keakuratan hasil penelitian dapat ditingkatkan serta memberikan gambaran kondisi yang lebih representatif.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis tambahan seperti analisis daya dukung dan daya tampung, serta mempertimbangkan kelengkapan fasilitas umum sebagai salah satu variabel dalam penelitian sehingga hasil analisis dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kemampuan suatu wilayah dalam menampung aktivitas dan pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan